



Marginalisasi Perkotaan dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miskin Kota di Permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur Jakarta Utara

Chasya Nabila¹, Naila Azaria Arumi^{2*}, Nova Jojor³, Aniqotul Ummah⁴, Teddy Chrisprimanata Putra⁵

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410413017@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan perkotaan yang pesat di Indonesia belum sepenuhnya diikuti pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan ruang hidup yang layak bagi masyarakat miskin kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk marginalisasi yang dialami *urban poor* dan kelompok minoritas di permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur, Jakarta Utara, serta memahami strategi bertahan hidup yang mereka bangun dalam menghadapi kerentanan perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep *advanced marginality*, *urban exclusion*, dan *territorial stigma* dari Loïc Wacquant untuk membaca marginalisasi struktural, serta konsep *survival strategies* dan *everyday resistance* dari James C. Scott untuk memahami respons masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga menghadapi banjir berulang, keterbatasan akses transportasi publik, ketimpangan distribusi bantuan sosial, serta minimnya layanan dasar yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa marginalisasi yang dialami warga bukan sekadar persoalan ekonomi individual, melainkan hasil dari ketimpangan tata kelola kota dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Di tengah keterbatasan tersebut, masyarakat mengembangkan strategi bertahan melalui pekerjaan informal, pengelolaan sumber daya rumah tangga, solidaritas sosial berbasis kepercayaan, musyawarah warga, serta normalisasi terhadap risiko banjir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan komunitas menjadi modal penting dalam menghadapi kerentanan perkotaan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab negara dalam menyediakan intervensi yang adil, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi kelompok rentan di wilayah perkotaan, khususnya permukiman padat yang selama ini kurang memperoleh perhatian struktural dalam kebijakan pembangunan kota yang berkeadilan dan berbasis hak warga setara.

Kata Kunci: Marginalisasi Perkotaan, Masyarakat Miskin Kota, Strategi Bertahan Hidup, *Everyday Resistance*, Pesanggrahan.

1. Pendahuluan

Urbanisasi di Indonesia bukan sekadar perpindahan penduduk dari desa ke kota, melainkan sebuah perubahan struktural besar yang secara menyeluruh mengubah cara masyarakat mengakses sumber daya, pekerjaan, dan ruang hidup. Kota tumbuh sebagai pusat konsentrasi ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur yang menjadi daya tarik utama bagi jutaan orang dari berbagai daerah, namun pertumbuhan tersebut tidak pernah benar-benar berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2024 masih terdapat sekitar 11,05 juta penduduk perkotaan Indonesia yang hidup dalam kondisi miskin, meskipun angka ini secara statistik menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya (BPS-Statistics Indonesia, 2025). Yang perlu digarisbawahi dari data tersebut bukan hanya angkanya, tetapi fakta bahwa jutaan orang miskin hidup di dalam kota yang terus berkembang, yang berarti pertumbuhan ekonomi perkotaan belum mampu menjangkau semua lapisan secara merata. Kondisi inilah yang melahirkan fenomena *urban poor*, yaitu kelompok masyarakat yang tidak hanya kekurangan pendapatan, tetapi juga mengalami keterbatasan struktural dalam mengakses ruang kota, layanan publik, keamanan bermukim, dan perlindungan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka (Massauna et al., 2025).

Kota tidak bisa dipahami sebagai ruang fisik yang berkembang secara ekonomi. Kota adalah ruang perebutan sumber daya, akses, dan kekuasaan antarkelompok sosial, di mana pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi sering menghasilkan polarisasi sosial yang tajam antara kelompok yang memiliki modal dengan kelompok yang tidak. Urbanisasi memang mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan, namun juga menciptakan tekanan besar terhadap penyediaan perumahan, transportasi, sanitasi, dan lingkungan hidup yang layak bagi semua warga.

Fadhil et al. (2024) mencatat bahwa dari sekitar 147,71 juta penduduk yang masuk dalam angkatan kerja nasional per Agustus 2023, sebanyak 82,67 juta di antaranya merupakan pekerja informal, yang berarti lebih dari separuh tenaga kerja di Indonesia bergantung pada sektor yang tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Ketika kebutuhan ruang untuk pembangunan komersial dan infrastruktur terus meningkat, tekanan terhadap ruang hidup

masyarakat berpenghasilan rendah menjadi semakin besar dan kelompok miskin kota pada akhirnya tidak memiliki banyak pilihan selain menempati wilayah-wilayah yang secara ekologis rentan, seperti bantaran sungai, permukiman rawan banjir, atau permukiman padat dengan infrastruktur minim, karena harga lahan di sana masih terjangkau dan memungkinkan untuk bertahan hidup (Lasaiba, 2022).

Kondisi hunian yang padat, sanitasi buruk, drainase tidak memadai, dan keterbatasan akses air bersih pada akhirnya memperbesar risiko kesehatan sekaligus memperdalam kerentanan sosial masyarakat secara bersamaan. Yang menjadi persoalan mendasar di sini adalah bahwa kondisi ini bukan kebetulan, tetapi hasil dari pilihan kebijakan pembangunan kota yang selama ini lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dibandingkan keadilan distribusi ruang dan layanan bagi kelompok yang paling rentan.

Loic Wacquant (2008) menjelaskan bahwa kondisi semacam ini tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan kemiskinan individual. Marginalisasi perkotaan lahir dari hubungan antara ketimpangan ekonomi, segregasi ruang, dan lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok rentan, sehingga kemiskinan kota sejatinya merupakan persoalan keterasingan sosial dan spasial dalam struktur kota modern yang tidak setara. Wacquant menyebut kondisi ini sebagai *advanced marginality*, di mana masyarakat miskin kota tidak hanya mengalami kekurangan pendapatan, tetapi juga hidup dalam ketidakpastian sosial, keterasingan ruang, dan hilangnya akses terhadap peluang hidup akibat melemahnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan kelompok yang paling rentan.

Dalam kondisi tersebut, kota tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara aktif menghasilkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan di dalam proses pembangunan itu sendiri. Konsep *urban exclusion* dari Wacquant menggambarkan bagaimana kelompok tertentu tersingkir dari akses penuh terhadap fasilitas dan kehidupan kota, sementara *territorial stigma* menjelaskan bagaimana stigma sosial negatif melekat pada permukiman miskin dan penghuninya sehingga semakin mempersulit mereka untuk memperoleh pengakuan dan kesempatan yang setara dalam struktur kota. Keduanya bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat, membentuk lingkaran kerentanan yang sangat sulit untuk diputus tanpa intervensi struktural yang nyata dari negara.

Persoalan ini sangat terlihat dalam konteks Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia. Di satu sisi, Jakarta tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dan magnet urbanisasi yang menarik jutaan pendatang setiap tahunnya, namun di sisi lain pertumbuhan itu menciptakan tekanan sosial yang besar bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingginya kepadatan penduduk, mahalnya biaya hidup, dan ketatnya kompetisi ruang kota membuat kelompok miskin semakin terpinggirkan ke wilayah-wilayah yang tidak mendapat perhatian pembangunan secara memadai. Nugroho & Murtasidin (2023) dalam penelitiannya di Kampung Tambora, Jakarta, menemukan bahwa masyarakat miskin perkotaan membangun strategi penghidupan mereka di atas sumber daya yang sangat terbatas, dan banyak di antara mereka tidak memiliki akses terhadap informasi maupun pilihan penghidupan yang lebih baik karena hambatan struktural yang menghalangi mereka sejak awal. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan bukan lahir dari kemalasan atau kegagalan individu, melainkan dari cara pembangunan kota dijalankan yang secara sistematis menutup akses bagi kelompok yang paling rentan. Meskipun negara secara konstitusional memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas tempat tinggal layak dan lingkungan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945, dalam kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum tersebut dan realitas kehidupan kelompok miskin perkotaan yang terus menghadapi keterbatasan akses layanan dasar (Fitri et al., 2025). Kesenjangan antara norma dan realitas inilah yang menurut penulis menjadi bukti bahwa persoalan *urban poor* bukan sekadar persoalan sosial ekonomi, melainkan persoalan politik distribusi sumber daya dan tanggung jawab negara yang selama ini belum benar-benar dijalankan.

Kondisi tersebut terlihat nyata di permukiman Pesanggrahan, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang menjadi lokus kajian dalam penelitian ini. Permukiman ini dihuni oleh mayoritas masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang sebagian besar bergantung pada sektor informal seperti buruh konveksi, pedagang pasar, dan pekerja serabutan, dengan tingkat kepadatan permukiman yang sangat tinggi, kondisi hunian yang sebagian besar masih semi-permanen, serta bangunan-bangunan yang saling berhimpitan tanpa ruang yang memadai. Selain persoalan kualitas hunian, permukiman ini juga berulang kali mengalami banjir yang secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga, dan banjir tersebut telah menjadi ancaman berulang yang belum mendapat penanganan struktural yang serius dari pemerintah kota (Ayu & Huda, 2025). Keterbatasan akses terhadap air bersih yang merupakan kebutuhan paling mendasar pun masih menjadi persoalan yang belum tuntas, terbukti dari aksi damai yang pernah digelar warga menuntut realisasi pipanisasi PAM Jaya sebagai bentuk perjuangan atas hak dasar yang semestinya sudah terpenuhi (He, 2025).

Situasi di Pesanggrahan ini memperlihatkan kontradiksi yang sangat mendasar, di mana warga tinggal di dalam wilayah Jakarta yang merupakan pusat pembangunan nasional, namun mereka justru tidak menikmati hasil pembangunan tersebut secara setara. Dan marginalisasi bukan hanya soal jarak geografis dari pusat kota, tetapi soal posisi sosial dan ekonomi seseorang dalam struktur kota yang menentukan seberapa besar akses yang mereka miliki terhadap layanan dan fasilitas yang ada.

Di tengah kerentanan yang berlapis itu, menjadi penting untuk tidak memandang *urban poor* sekadar sebagai kelompok yang pasif menerima kondisi yang ada. James C. Scott (1985) dalam *Weapons of the Weak* menegaskan bahwa kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah secara struktural justru mengembangkan berbagai *survival strategy* sebagai cara bertahan yang rasional dan adaptif. Perlawanan dalam pandangan Scott tidak selalu berbentuk aksi politik yang terbuka dan terorganisir, melainkan dapat muncul dalam bentuk resistensi sehari-hari yang terintegrasi dalam praktik sosial harian, mulai dari kerja informal, penguatan jaringan solidaritas antarwarga, penghindaran terhadap kebijakan yang merugikan, hingga pemanfaatan celah-celah sistem yang ada.

Dalam konteks Pesanggrahan, praktik saling membantu saat banjir, berbagi sumber daya antarwarga, dan mengembangkan usaha berbasis rumah dapat dipahami sebagai bagian dari sistem bertahan hidup kolektif yang dibangun dari bawah, justru karena negara belum hadir secara optimal dalam menjamin hak dasar mereka. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa strategi bertahan yang dibangun di atas sumber daya terbatas ini sering kali tidak berkelanjutan dan tidak mampu memutus akar struktural kerentanan, sebagaimana ditunjukkan Nugroho & Murtasidin (2023) yang menemukan bahwa banyak rumah tangga miskin perkotaan gagal keluar dari lingkaran kerentanan karena strategi yang mereka miliki tidak ditopang oleh kebijakan yang berpihak pada mereka. Artinya, kreativitas sosial *urban poor* memang nyata dan perlu diakui, tetapi ia tidak bisa dijadikan alasan bagi negara untuk absen dari tanggung jawabnya.

Kajian mengenai *urban poor* di permukiman marginal perkotaan memang sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun meninggalkan celah yang perlu diisi. Satrio & Sukmawati (2021) dalam penelitiannya “Kebertahanan Masyarakat Pada Permukiman Kumuh Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga” di permukiman kumuh Kelurahan Salatiga menemukan bahwa ikatan sosial, semangat keguyuban, dan kedekatan lokasi kerja menjadi faktor utama yang mendorong warga tetap bertahan di permukiman kumuh meski kondisi lingkungan jauh dari layak, termasuk tradisi kerja bakti dan dasawisma yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial komunal.

Namun penelitian ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena cenderung memusatkan perhatian pada faktor internal masyarakat, seperti aspek sosial dan ekonomi, tanpa cukup mengaitkannya dengan struktur produksi ruang kota yang timpang. Penelitian tersebut bahkan menjelaskan bahwa kondisi kumuh muncul karena topografi lingkungan dan perilaku warga seperti kebiasaan membuang sampah atau sanitasi yang buruk, yang berisiko menempatkan masyarakat miskin sebagai penyebab utama kekumuhan, padahal persoalan tersebut lahir dari ketimpangan pembangunan, lemahnya distribusi layanan publik, serta kebijakan kota yang tidak merata. Selain itu, penelitian Satrio & Sukmawati (2021) juga belum menyoroti secara spesifik kelompok minoritas sebagai bagian dari *urban poor* sehingga pembahasan mengenai eksklusi sosial masih terbatas pada level permukiman dan belum menyentuh dimensi struktural yang lebih luas. Sementara itu, Wijangga et al. (2025) “Urbanisasi dan Disparitas Kesejahteraan di Perkotaan: Sebuah Tinjauan Sistematis tentang Dampak pada Kelompok Rentan” melalui tinjauan sistematis terhadap 42 artikel menemukan bahwa urbanisasi memperdalam ketimpangan secara bersamaan dalam empat aspek, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan layanan dasar, dengan kelompok rentan selalu berada di posisi paling dirugikan.

Namun penelitian ini hanya sampai pada pemetaan gejala ketimpangan tanpa benar-benar membedah akar struktural yang memproduksinya, dan yang lebih penting lagi tidak membahas sama sekali bagaimana kelompok yang termarginalkan itu merespons dan bertahan dari tekanan yang mereka hadapi setiap harinya. *Urban poor* dalam penelitian Wijangga et al. (2025) masih diperlakukan sebagai pihak yang terdampak, bukan sebagai kelompok yang memiliki cara dan strategi sendiri untuk tetap bertahan hidup.

Selanjutnya, Putri et al. (2026) dalam artikelnya yang berjudul “Kemiskinan Perkotaan sebagai Fenomena Multidimensional: Dinamika dan Strategi Bertahan Kelompok Rentan di Permukiman Sempadan Sungai Cibeureum, Kota Bandung” menjelaskan bahwa kemiskinan perkotaan tidak dapat dipahami hanya dari aspek pendapatan, melainkan merupakan persoalan multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap ruang hidup, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok rentan yang tinggal di kawasan sempadan sungai mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup untuk menghadapi tekanan ekonomi dan kondisi lingkungan yang tidak menentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat miskin perkotaan memiliki kapasitas adaptasi yang kuat meskipun berada dalam situasi serba terbatas.

Walau begitu, penelitian Putri et al. (2026) lebih menitikberatkan pada dinamika kemiskinan dan praktik adaptasi masyarakat tanpa secara mendalam membahas bagaimana struktur kota memproduksi dan mempertahankan marginalisasi. Kemiskinan perkotaan dalam penelitian tersebut masih dipahami terutama sebagai persoalan kerentanan sosial dan ekonomi, sementara dimensi eksklusi perkotaan, stigma wilayah, dan keterasingan spasial belum dianalisis secara komprehensif. Selain itu, kelompok rentan dalam penelitian tersebut belum secara spesifik diposisikan sebagai kelompok minoritas yang mengalami pengalaman marginalisasi yang berbeda dalam struktur perkotaan.

Artikel ini berbeda dengan penelitian Putri et al. (2026). Meskipun sama-sama membahas masyarakat miskin perkotaan dan strategi bertahan hidup, artikel ini menempatkan marginalisasi struktural sebagai fokus utama melalui penggunaan konsep *advanced marginality*, *urban exclusion*, dan *territorial stigma* dari Loïc Wacquant.

Pada saat yang sama, strategi bertahan hidup masyarakat tidak hanya dipahami sebagai bentuk adaptasi, tetapi juga sebagai *everyday resistance* sebagaimana dijelaskan James C. Scott. Keunggulan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan dimensi struktural dan agensi masyarakat secara bersamaan, sehingga *urban poor* di permukiman Pesanggrahan dipahami tidak hanya sebagai kelompok yang terdampak ketimpangan, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membangun mekanisme bertahan hidup di tengah keterbatasan akses kota.

Kemudian, Hasibuan & Muary (2026) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Bertahan Hidup Keluarga Miskin Perkotaan di Permukiman Kumuh Jalan Badur, Kecamatan Medan Maimun” menemukan bahwa keluarga miskin perkotaan mengembangkan berbagai strategi adaptasi melalui pekerjaan informal, pelibatan anggota keluarga dalam aktivitas ekonomi, serta pemanfaatan hubungan sosial antarwarga untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi perkotaan yang membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya.

Fokus penelitian tersebut masih berada pada unit keluarga sebagai aktor utama, sehingga dimensi spasial perkotaan dan proses marginalisasi wilayah belum dibahas secara mendalam. Kajian mengenai territorial stigma dan urban exclusion juga belum digunakan untuk menjelaskan mengapa kelompok miskin cenderung terkonsentrasi pada kawasan-kawasan tertentu yang rentan secara ekologis maupun sosial. Penelitian ini berbeda karena melihat permukiman Pesanggrahan bukan sekadar tempat tinggal masyarakat miskin, tetapi sebagai ruang yang diproduksi melalui ketimpangan pembangunan kota. Penggunaan konsep *advanced marginality* dari Loïc Wacquant memungkinkan pembacaan yang lebih luas mengenai keterasingan sosial dan spasial yang dialami *urban poor*.

Penelitian Carias et al. (2022) berjudul “*Flood Disasters and Health Among the Urban poor*” mengkaji dampak banjir terhadap kesehatan fisik dan mental masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok *urban poor* yang tinggal di permukiman informal mengalami peningkatan gangguan kesehatan fisik dan psikologis pascabanjir, bahkan dampak psikologisnya dapat berlangsung lebih lama dibandingkan dampak fisik. Penelitian tersebut berhasil menunjukkan bahwa kerentanan terhadap bencana tidak terlepas dari kondisi kemiskinan dan kualitas lingkungan permukiman. Akan tetapi, fokus kajian masih terpusat pada konsekuensi kesehatan akibat bencana sehingga belum membahas bagaimana masyarakat membangun strategi bertahan hidup dan jaringan solidaritas untuk menghadapi kerentanan tersebut. Selain itu, banjir lebih dipahami sebagai peristiwa lingkungan, bukan sebagai bentuk ketimpangan struktural dalam tata kelola kota. Penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan melihat banjir sebagai bagian dari proses marginalisasi perkotaan yang lahir dari distribusi ruang dan layanan publik yang tidak merata. Dengan demikian, banjir dipahami bukan sekadar bencana alam, tetapi juga cerminan ketidakadilan pembangunan kota.

Amaya et al. (2024) dalam artikel “Dampak Urbanisasi dalam Kehidupan Masyarakat Kota” menjelaskan bahwa urbanisasi membawa dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat perkotaan, mulai dari perubahan tata guna lahan, meningkatnya kebutuhan infrastruktur, hingga munculnya persoalan kemiskinan dan permukiman kumuh. Penelitian tersebut memberikan gambaran makro mengenai konsekuensi urbanisasi terhadap kehidupan kota. Namun, urbanisasi dalam penelitian tersebut masih dipahami pada level umum dan belum secara spesifik menjelaskan bagaimana kelompok miskin kota mengalami eksklusi dari akses ruang, layanan publik, dan perlindungan sosial.

Kelompok *urban poor* lebih banyak diposisikan sebagai dampak dari urbanisasi, bukan sebagai aktor yang memiliki pengalaman dan strategi bertahan hidup yang khas. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan *urban poor* dan kelompok minoritas sebagai subjek utama penelitian sehingga pengalaman keseharian mereka dalam menghadapi banjir, keterbatasan layanan dasar, dan stigma wilayah dapat dipahami secara lebih mendalam. Keunggulan penelitian tersebut terletak pada upaya menghubungkan proses urbanisasi dengan marginalisasi struktural sekaligus strategi bertahan hidup masyarakat dalam ruang kota yang tidak setara. Dan celah inilah yang secara spesifik ingin diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan menggabungkan pembacaan struktural atas marginalisasi melalui kerangka *advanced marginality* Wacquant dan pembacaan agensi masyarakat melalui kerangka *survival strategy* Scott, sehingga *urban poor* di permukiman Pesanggrahan tidak hanya dipahami sebagai korban dari ketimpangan pembangunan, tetapi juga sebagai kelompok yang aktif membangun strategi bertahan hidup kolektif di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami *urban poor* dan kelompok minoritas dalam struktur perkotaan di permukiman Pesanggrahan dengan menggunakan pemikiran *advanced marginality* Wacquant. Kedua, memahami bagaimana kelompok tersebut membangun strategi bertahan hidup sebagai respons terhadap kerentanan lingkungan dan keterbatasan akses kota yang mereka hadapi, melalui pemikiran *survival strategy* James C. Scott.

Dari masalah yang ada, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yang akan menjadi arah pembahasan yaitu, apakah masyarakat *urban poor* dan kelompok minoritas di permukiman Pesanggrahan telah mendapatkan akses dan perhatian yang adil dari kota, atau masih berada dalam kondisi terpinggirkan? Lalu, bagaimana masyarakat *urban poor* dan kelompok minoritas di permukiman Pesanggrahan membangun strategi bertahan hidup dalam menghadapi kerentanan lingkungan, keterbatasan akses layanan kota, serta ketidakpastian ruang hidup?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada masyarakat *urban poor* yang tinggal di permukiman Pesanggrahan, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pemilihan permukiman tersebut tidak dilakukan secara acak, melainkan berangkat dari berbagai persoalan perkotaan yang selama beberapa tahun terakhir terus muncul dan dirasakan langsung oleh warga. Banjir yang berulang, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kepadatan permukiman, serta tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor pekerjaan informal menunjukkan bahwa sebagian warga masih berhadapan dengan berbagai bentuk kerentanan perkotaan.

Kemudian, wilayah ini juga dihuni oleh banyak pendatang yang memilih menetap karena biaya hunian yang relatif lebih terjangkau dibandingkan permukiman lain di Jakarta. Situasi tersebut menjadikan Pesanggrahan sebagai lokasi yang relevan untuk melihat bagaimana proses marginalisasi berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat miskin perkotaan sekaligus bagaimana mereka membangun berbagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah keterbatasan yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur besarnya suatu gejala melalui angka statistik, melainkan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan makna yang dibentuk oleh masyarakat terhadap realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui pendekatan ini, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan perkotaan, keterpinggiran sosial, hingga strategi bertahan hidup dapat dipahami secara lebih mendalam melalui sudut pandang warga yang mengalaminya secara langsung.

Penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial maupun kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2023). Sementara itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2023). Pemilihan pendekatan dan jenis penelitian tersebut dianggap sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya menjelaskan bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami masyarakat *urban poor* serta berbagai strategi yang mereka lakukan untuk menghadapi kerentanan kehidupan perkotaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi pustaka, dokumentasi, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep *urban poor*, marginalitas perkotaan, strategi bertahan hidup, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan kemiskinan perkotaan. Selain itu, berbagai dokumen pendukung seperti laporan pemerintah, berita daring, data statistik, dan publikasi resmi digunakan untuk melengkapi informasi mengenai kondisi permukiman Pesanggrahan. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna melihat kondisi lingkungan permukiman, infrastruktur dasar, kepadatan hunian, aktivitas ekonomi warga, serta bentuk-bentuk adaptasi masyarakat terhadap banjir dan persoalan lingkungan lainnya. Melalui observasi, data yang diperoleh tidak hanya berasal dari pernyataan informan, tetapi juga dari kenyataan yang dapat diamati secara langsung di lapangan.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap tiga orang informan yang dipilih secara purposive atau berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan pertama merupakan warga setempat yang tinggal dan menjalani aktivitas sehari-hari di permukiman Pesanggrahan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman hidup sebagai bagian dari masyarakat yang terdampak berbagai persoalan perkotaan. Informan kedua merupakan pemuda setempat yang berperan sebagai pendamping observasi lapangan. Kehadiran informan ini dipandang penting karena memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, dinamika sosial masyarakat, serta perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Informan ketiga merupakan warga yang telah tinggal dalam waktu relatif lama di permukiman Pesanggrahan.

Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengalaman tinggal yang panjang memungkinkan diperolehnya informasi mengenai perubahan lingkungan, hubungan masyarakat dengan pemerintah, serta perkembangan berbagai persoalan yang dihadapi warga dari waktu ke waktu. Ketiga informan tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan sudut pandang yang saling melengkapi sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kehidupan masyarakat *urban poor* di permukiman penelitian.

Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasi seluruh data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahap awal dilakukan melalui proses membaca dan menelaah seluruh data secara berulang untuk menemukan pola-pola yang muncul. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan, seperti kondisi permukiman, akses terhadap layanan kota, hubungan warga dengan pemerintah, strategi ekonomi rumah tangga, solidaritas sosial, serta bentuk-bentuk adaptasi terhadap banjir. Analisis data kualitatif dilakukan melalui proses pengorganisasian data, pengkodean, pengembangan tema, dan interpretasi makna dari temuan penelitian (Creswell & Creswell, 2023).

Dalam proses interpretasi, penelitian ini menggunakan konsep *advanced marginality*, *urban exclusion*, dan *territorial stigma* dari Loïc Wacquant untuk membaca berbagai bentuk marginalisasi yang dialami masyarakat *urban poor*. Sementara itu, konsep *survival strategy*, *everyday resistance*, dan *ordinary weapons of the weak* dari James C. Scott digunakan untuk memahami berbagai tindakan yang dilakukan warga dalam mempertahankan keberlangsungan hidup mereka. Penggunaan kedua perspektif tersebut memungkinkan temuan lapangan tidak

hanya berhenti pada deskripsi mengenai kemiskinan dan kerentanan perkotaan, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antara proses keterpinggiran yang dialami warga dengan berbagai bentuk respons yang mereka bangun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Hasil dan Pembahasan

Marginalisasi *Urban poor* dalam Struktur Perkotaan

Permukiman Pesanggrahan di Pademangan Timur, Jakarta Utara, adalah satu dari sekian banyak kantong permukiman padat di ibu kota yang tumbuh bukan karena direncanakan, melainkan karena kebutuhan. Warga yang tinggal di sini sebagian besar datang karena satu alasan sederhana karena murah. Seperti yang disampaikan salah satu warga yang sudah tinggal sejak kecil “Saya tinggal di sini sudah 20 tahun, dari saya usia 1 tahun. Kenapa saya memilih tempat ini Karena dulu kata orang tua saya tanah di sini murah.” Pola serupa terulang pada narasumber lain seorang ibu rumah tangga yang sudah menetap lebih dari 10 tahun memilih permukiman ini karena dekat sekolah anak dan harga kontrak yang terjangkau, sementara warga lainnya menyebutkan kedekatan dengan tempat kerja sebagai pertimbangan utama. Pola ini mencerminkan apa yang oleh Faturahim et al. (2023) disebut sebagai karakteristik *urban poor* keterbatasan pilihan yang mendorong masyarakat berpenghasilan rendah terkonsentrasi di permukiman-permukiman marjinal yang secara geografis tidak ideal namun secara ekonomi terjangkau.

Kondisi fisik permukiman ini tidak bisa dilepaskan dari kedekatannya dengan kali. Lokasi yang berada di tepi sungai membuat permukiman ini rentan secara ekologis yaitu drainase yang buruk, kepadatan bangunan yang tinggi, dan minimnya ruang terbuka menciptakan ekosistem permukiman yang secara struktural rapuh. (Nath, 2024) mengingatkan bahwa komunitas-komunitas semacam ini berada di garis terdepan dampak lingkungan, namun justru paling sedikit mendapat dukungan pemerintah yang memadai dan proaktif. Kondisi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari bagaimana ruang kota diproduksi dan didistribusikan secara tidak setara di mana kelompok berpenghasilan rendah secara sistematis diarahkan ke lokasi-lokasi yang paling rentan terhadap berbagai risiko lingkungan dan sosial.

Temuan ini juga menguatkan penelitian Carías et al. (2022) yang menunjukkan bahwa masyarakat *urban poor* di Indonesia memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak bencana, terutama mereka yang tinggal di permukiman informal dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dasar. Penelitian tersebut menegaskan bahwa permukiman padat di wilayah rentan bencana tidak hanya menghadapi kerugian ekonomi, tetapi juga berbagai dampak sosial dan kesehatan yang berkepanjangan.



Figure 1. Kondisi permukiman padat di tepi kali permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur, Jakarta Utara.
Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026).

Salah satu temuan paling mencolok dari wawancara lapangan adalah bagaimana banjir sudah menjadi bagian dari keseharian warga bukan sebagai kejadian luar biasa, melainkan sebagai rutinitas musiman yang sudah diantisipasi namun tidak pernah benar-benar diselesaikan. Seorang warga menggambarkan situasi ini mengatakan “Kalau di sini, banjir masih sering terjadi apabila hujan yang cukup terus berkelanjutan. Dan akses banjir ini sangat mengganggu aktivitas di sini.” Warga lain menyampaikan hal yang lebih konkret tentang bagaimana banjir mengganggu aktivitas harian yang paling dasar “Apalagi kalau misalnya banjir tuh kalau mau ke pasar, mau nganter anak sekolah, itu bikin pusing.” Sementara narasumber lainnya memberi perspektif yang sedikit berbeda ia menyebut banjir sebagai banjir musiman yang bersifat siklikal dan bisa diprediksi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari kondisi yang harus dihadapi. Pola ini sangat relevan dengan konsep *advanced marginality* yang dikemukakan Wacquant, di mana marginalisasi bukan hanya soal kemiskinan material, tetapi juga soal bagaimana kelompok *urban poor* terjebak dalam kondisi kerentanan yang terus-menerus dan sistematis terhadap ancaman lingkungan yang berulang tanpa penyelesaian struktural.

Banjir yang berulang tanpa penanganan serius adalah masalah paling nyata dari *urban exclusion*. Permukiman seperti Pesanggrahan tidak mengalami banjir semata-mata karena faktor alam, tetapi karena posisi strukturalnya dalam tata ruang kota yang menempatkan permukiman padat berpenghasilan rendah di lokasi-lokasi yang paling rentan. Faturahim et al. (2023) menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan tidak semata-mata soal pendapatan, tetapi berkaitan erat dengan aspek lingkungan sosial dan akses terhadap layanan. Ketika ditanya soal penanganan

banjir dari pemerintah, seorang warga mengonfirmasi absennya negara dalam menghadirkan solusi atas salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi warga.

Keterbatasan akses terhadap layanan kota tidak berhenti pada soal banjir. Dalam hal transportasi, salah satu warga menggambarkan “Situasinya susah dari wilayah kita dan bila ingin naik transportasi umum tersebut, baru ada JakLingko.” Warga lain mengonfirmasi hal serupa, menyebut JakLingko sebagai satu-satunya opsi dengan jarak tempuh sekitar 5 menit jalan kaki. Meski jarak ini tidak ekstrem, dalam kondisi banjir jarak tersebut bisa menjadi hambatan yang sangat nyata. Mpanje et al. (2022) dalam studinya tentang permukiman informal di Nairobi menemukan pola yang sangat mirip bahwa penghuni permukiman informal memiliki akses yang sangat terbatas terhadap layanan formal kota, dan ketika bantuan datang, sifatnya sering kali tidak konsisten dan tidak membangun kapasitas jangka panjang.

Dalam hal bantuan sosial, distribusinya pun tidak merata. Satu warga menyebut berbagai bantuan dari program sosial seperti ambulans, sembako, dan Geraha Peduli. Warga lain hanya menyebut bansos saat pandemi COVID-19. Bahkan ada yang menyatakan “Enggak deh kayaknya, enggak dapat. Bansos.” Ketiga jawaban yang berbeda ini dari warga di permukiman yang sama mengindikasikan bahwa distribusi bantuan sosial tidak terstruktur dengan baik dan tidak menjangkau semua warga secara setara. Ketidakmerataan ini merupakan salah satu ciri *territorial stigma* dalam kerangka Wacquant di mana permukiman-permukiman termarginalkan menerima perhatian negara yang bersifat sporadis dan reaktif, bukan sistematis dan berbasis hak warga.

Temuan mengenai keterbatasan akses warga terhadap hunian layak, pekerjaan formal, dan layanan perkotaan juga memperlihatkan karakteristik kemiskinan perkotaan yang lebih luas. Penelitian Hadijah & Sadali (2020) menunjukkan bahwa proses urbanisasi di Indonesia tidak selalu menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang merata. Urbanisasi sering kali hanya memindahkan kemiskinan dari desa ke kota sehingga melahirkan kelompok *urban poor* yang tetap mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Dalam banyak kasus, migrasi ke kota tidak diikuti dengan kemampuan untuk memasuki sektor formal sehingga kelompok berpendapatan rendah terkonsentrasi di kawasan-kawasan marginal dan permukiman informal. Kondisi tersebut terlihat pula di Pesanggrahan, di mana warga harus beradaptasi dengan berbagai keterbatasan sambil tetap mempertahankan keberlangsungan hidupnya melalui strategi-strategi informal sehari-hari.

Kondisi ini memperkuat temuan Hasibuan & Muary (2026) bahwa keluarga miskin perkotaan sering kali harus mengandalkan sumber daya internal rumah tangga dan jaringan sosial karena terbatasnya akses terhadap program perlindungan sosial yang berkelanjutan. Ketidakpastian bantuan membuat masyarakat mengembangkan mekanisme bertahan hidup secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan warga terhadap pemerintah pun diungkapkan dengan cara yang jujur namun penuh beban. Kalimat ini secara tidak langsung merumuskan kesadaran akan posisi struktural mereka sebagai kelompok yang secara sistematis dipinggirkan dalam tata kelola kota. Warga yang sama bahkan menambahkan “Enggak cuma yang gede-gede yang kaya malah dapat bantuan, yang susah enggak dapat bantuan.” Pernyataan ini mencerminkan pengalaman hidup di bawah *advanced marginality* kondisi di mana kelompok *urban poor* tidak hanya kekurangan secara material, tetapi juga merasa diperlakukan secara tidak adil oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Terkait ancaman pengusuran bagi permukiman di tepi kali, para warga menunjukkan sikap yang relatif pasif namun tidak tanpa mekanisme respons. Satu warga menyebut musyawarah RT/RW sebagai jalur yang akan ditempuh, sementara warga lainnya menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah. Sikap ini bukan semata-mata kepatuhan buta, melainkan pragmatisme yaitu respons terhadap kondisi di mana warga memiliki sedikit sekali daya tawar struktural. Gambaran mengenai kehidupan masyarakat di Pesanggrahan juga memperlihatkan bahwa dampak urbanisasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata. Sejalan dengan Amaya et al. (2024), urbanisasi memang membuka peluang ekonomi di perkotaan, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan tekanan terhadap ruang hidup, infrastruktur, dan akses layanan dasar bagi kelompok berpenghasilan rendah. Akibatnya, kelompok *urban poor* sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap berbagai konsekuensi pembangunan kota. Pada akhirnya, temuan ini menjawab pertanyaan penelitian pertama yaitu masyarakat *urban poor* di permukiman Pesanggrahan belum mendapatkan akses dan perhatian yang adil dari kota mereka masih berada dalam kondisi terpinggirkan yang bersifat struktural, bukan insidental.

Strategi Bertahan Hidup sebagai Bentuk Everyday Resistance

Meski berada dalam kondisi yang serba terbatas, warga Pesanggrahan menunjukkan kemampuan adaptasi yang jauh dari pasif. Para narasumber memiliki strategi bertahan hidup yang berbeda-beda namun semuanya beroperasi di luar atau di pinggiran ekonomi formal. Dua dari tiga warga yang diwawancarai menyebut dirinya sebagai ibu rumah tangga namun dalam konteks permukiman padat berpenghasilan rendah, peran ini tidak sesederhana kedengarannya. Pengelolaan sumber daya keluarga secara ketat, pengaturan prioritas pengeluaran, dan penjagaan arus kas rumah tangga adalah bentuk-bentuk kerja ekonomi yang nyata meski tidak terhitung secara formal.

Situasi yang dialami warga Pesanggrahan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari fenomena kemiskinan perkotaan yang lebih luas. Lestianpuri & Arif (2025) menjelaskan bahwa *urban poverty* muncul sebagai konsekuensi dari ketimpangan sosial ekonomi di kota, di mana kelompok berpendapatan rendah sering kali terkonsentrasi pada kawasan-kawasan marginal dan permukiman informal. Kelompok yang paling rentan

adalah mereka yang memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan formal, layanan dasar, dan hunian yang layak. Kondisi tersebut membantu menjelaskan mengapa masyarakat Pesanggrahan harus mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup untuk menghadapi tekanan ekonomi dan lingkungan yang mereka alami sehari-hari. Salah satu warga yang masih berstatus mahasiswa menggambarkan kondisi keluarganya yang memilih menetap di permukiman ini sebagai keputusan ekonomi yang sangat rasional untuk tinggal di lahan murah adalah strategi bertahan hidup yang disengaja, bukan kegagalan. Faturohim et al. (2023) menunjukkan bahwa kelompok miskin perkotaan cenderung terkonsentrasi di sektor informal bukan karena pilihan bebas, melainkan karena struktur pasar kerja yang tidak memberi mereka akses ke sektor formal. Dalam kerangka James C. Scott tentang *survival strategy*, pilihan-pilihan ekonomi ini adalah negosiasi aktif dengan kondisi yang ada bukan kekalahan, melainkan kecerdikan dalam keterbatasan.



Figure 2. Aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga di permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026).

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah kuatnya jaringan solidaritas sosial di permukiman Pesanggrahan, yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap dari layanan formal yang tidak tersedia. Seorang warga menggambarkan kondisi ini dengan “Ya namanya hidup di kota kan, satu saling menjagalah,” pernyataan ini singkat namun sangat bermakna saling menjaga adalah ekspresi dari apa yang dalam literatur sosial disebut sebagai *bonding social capital*, yakni ikatan sosial berbasis kepercayaan dan resiprositas di antara orang-orang yang tinggal berdekatan dan berbagi kondisi hidup yang serupa. Mpanje et al. (2022) menemukan bahwa dalam permukiman informal, modal sosial jenis ini menjadi mekanisme paling penting dalam menghadapi tekanan dan kejutan mulai dari kesulitan ekonomi hingga bencana lingkungan. Kemudian, mekanisme musyawarah RT/RW yang disebut salah satu warga sebagai cara merespons ancaman penertiban merupakan bentuk *bridging social capital* yang menghubungkan warga dengan institusi lokal yang memiliki akses ke pengambilan keputusan. Kuatnya solidaritas sosial yang ditemukan dalam penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Asyifani et al. (2021) mengenai masyarakat miskin di Dusun Kentheng, Surakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesamaan pengalaman kemiskinan mendorong terbentuknya budaya gotong royong yang berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Solidaritas sosial menjadi sumber daya yang memungkinkan masyarakat bertahan di tengah keterbatasan ekonomi dan marginalisasi perkotaan. Ketika akses terhadap sumber daya formal terbatas, hubungan sosial berbasis kepercayaan, kedekatan, dan saling membantu menjadi modal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat miskin kota. Temuan ini memperkuat argumen bahwa *bonding social capital* bukan sekadar relasi sosial biasa, melainkan sumber daya kolektif yang membantu warga menghadapi berbagai bentuk kerentanan.

Dalam kerangka Scott tentang *everyday resistance*, solidaritas ini bisa dibaca lebih dari sekadar gotong royong. Ketika komunitas secara kolektif mempertahankan jaringan saling bantu di tengah keterbatasan dan pengabaian sistemik, mereka sedang melakukan resistensi dalam bentuknya yang paling mendasar membuktikan bahwa mereka bisa bertahan, bisa saling merawat, dan bisa eksis tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem yang mengabaikan mereka. Nath (2024) mengingatkan bahwa komunitas-komunitas yang tidak mendapat dukungan pemerintah harus memutuskan sendiri bagaimana mereka beradaptasi, solidaritas antarwarga adalah keputusan adaptif yang paling konsisten dan paling berdaya.

Strategi adaptasi terhadap banjir juga mencerminkan cara warga bernegosiasi dengan kondisi lingkungan yang tidak pernah benar-benar diperbaiki. Dari wawancara, teridentifikasi beberapa mekanisme yang digunakan secara sadar maupun tidak sadar. Ada warga yang merespons banjir dengan menyesuaikan waktu perjalanan, menghindari area yang tergenang, dan menunggu air surut sebelum beraktivitas. Ada yang mengadaptasi rutinitas harian dengan menunda ke pasar atau mengantarkan anak ketika banjir terjadi. Yang paling menarik adalah framing dari salah satu warga yang menyebut banjir sebagai banjir musiman yang bisa diprediksi bukan berarti banjir tidak mengganggu, tetapi ini mencerminkan proses normalisasi sebagai strategi kognitif bertahan hidup, yakni mengkategorikan sesuatu sebagai hal biasa untuk mengurangi beban psikologis yang ditimbulkannya. Ini adalah salah satu bentuk *ordinary weapons of the weak* yang paling tidak dramatis namun paling konsisten kemampuan untuk terus berfungsi dan terus menjalani hari di tengah kondisi yang secara struktural tidak adil.

Adaptasi semacam ini memperlihatkan bahwa strategi bertahan hidup tidak selalu diwujudkan melalui tindakan ekonomi, tetapi juga melalui penyesuaian perilaku sehari-hari terhadap risiko lingkungan. Penelitian Sahanaya & Maswekan (2024) menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup dalam situasi keterbatasan akan mengembangkan berbagai bentuk adaptasi terhadap perubahan maupun tekanan yang mereka hadapi sebagai bagian dari survival strategy. Kemampuan untuk menyesuaikan aktivitas, mengubah rutinitas, dan menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari menjadi mekanisme penting yang memungkinkan kelompok rentan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Dalam kasus Pesanggrahan, normalisasi banjir musiman dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial sekaligus strategi psikologis untuk mengurangi beban yang ditimbulkan oleh kerentanan lingkungan yang berlangsung terus-menerus.

Untuk mengamati bagaimana seluruh strategi ini ekonomi informal, solidaritas sosial, dan adaptasi lingkungan beroperasi secara simultan dan saling menopang warga Pesanggrahan tidak menggunakan satu strategi tunggal mereka merajut berbagai mekanisme koping secara kreatif dan kontekstual. Dalam kerangka Scott, *everyday resistance* memang tidak selalu berbentuk perlawanan terbuka. Lebih sering, resistensi ditemukan dalam tindakan-tindakan sehari-hari yang kelihatannya biasa namun sesungguhnya merupakan penolakan terhadap kondisi penindasan yang dinormalisasi. Warga yang memilih tinggal di permukiman terjangkau, membangun jaringan saling bantu, menyesuaikan rutinitas saat banjir, dan menyuarakan harapan kepada pemerintah bahwa semua ini adalah bentuk *everyday resistance* yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Temuan ini juga bersinggungan dengan apa yang diidentifikasi Mpanje et al. (2022) bahwa komunitas dengan modal sosial yang kuat mampu mengembangkan strategi koping adaptif yang lebih luas dan lebih efektif, meski tanpa dukungan dari luar.

Namun ada satu catatan penting yang perlu digarisbawahi. Solidaritas yang kuat di level komunitas tidak bisa menggantikan absennya dukungan struktural dari negara. Seperti yang ditegaskan Nath (2024), komunitas yang dibiarkan beradaptasi sendirian hanya melakukan penyesuaian memperbaharui bukan yang sungguh-sungguh mengatasi akar persoalan kerentanan. Strategi bertahan hidup warga Pesanggrahan adalah bukti ketangguhan yang luar biasa, sekaligus cermin dari kegagalan kota untuk hadir secara adil bagi seluruh warganya. Di sinilah benturan antara dua kerangka teori menjadi produktif sebagaimana Wacquant membaca kondisi ini sebagai marginalisasi yang diproduksi secara struktural, sementara Scott membaca respons warga sebagai resistensi yang dipraktikkan secara kultural.

Keduanya benar, dan keduanya perlu didengar bersamaan karena tanpa memahami ketangguhan warga sekaligus ketidakadilan sistemnya, kita tidak akan bisa merumuskan solusi yang sungguh-sungguh bermakna. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian kedua yaitu warga Pesanggrahan membangun strategi bertahan hidup melalui kombinasi adaptasi ekonomi informal, solidaritas sosial berbasis kepercayaan, dan normalisasi kognitif terhadap ancaman lingkungan dan keseluruhan strategi ini, dalam maknanya yang paling dalam, dapat dibaca sebagai bentuk *everyday resistance* terhadap kondisi marginalisasi yang mereka hadapi setiap hari.

4. Kesimpulan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, masyarakat *urban poor* di permukiman Pesanggrahan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dan sumber daya perkotaan secara adil. Fenomena banjir yang terus berulang tanpa penanganan yang memadai, ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial, serta terbatasnya akses terhadap transportasi dan layanan publik menunjukkan adanya bentuk marginalisasi yang bersifat struktural dan berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi tersebut selaras dengan konsep advanced marginality dan *territorial stigma* yang dikemukakan oleh Wacquant, di mana kehadiran negara di wilayah ini cenderung bersifat sementara, reaktif, dan belum mampu menjawab kebutuhan warga secara komprehensif.

Meskipun berada dalam situasi yang penuh keterbatasan, masyarakat Pesanggrahan menunjukkan kemampuan adaptasi yang kuat. Berbagai strategi bertahan hidup dikembangkan melalui pemanfaatan sektor ekonomi informal, penguatan solidaritas sosial antarwarga yang didasarkan pada kepercayaan dan hubungan timbal balik, serta penerimaan terhadap risiko lingkungan seperti banjir sebagai bagian dari realitas kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif James C. Scott, praktik-praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *everyday resistance*, yaitu upaya perlawanan yang dilakukan secara halus dan berkelanjutan oleh kelompok masyarakat yang mengalami keterpinggiran. Ketangguhan warga dengan demikian muncul sebagai respons terhadap kondisi pengabaian struktural yang mereka alami secara terus-menerus.

Pemerintah kelurahan dan kecamatan perlu memperkuat upaya penanganan banjir melalui pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase serta infrastruktur pengendalian banjir yang direncanakan secara berkelanjutan, bukan hanya melalui tindakan darurat ketika bencana terjadi. Selain itu, program kebersihan lingkungan perlu ditingkatkan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman. Pada tingkat pemerintah kota Jakarta, diperlukan perbaikan dalam sistem distribusi bantuan sosial dan penyediaan layanan publik agar lebih merata, tepat sasaran, dan didasarkan pada data yang akurat. Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang perkotaan, terutama yang berkaitan dengan isu pengusuran dan penataan permukiman bantaran kali.

Untuk penelitian selanjutnya, kajian mengenai marginalisasi masyarakat *urban poor* perlu diperluas ke berbagai wilayah perkotaan lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan komparatif mengenai pola-pola eksklusi sosial yang terjadi. Selain itu, aspek gender perlu mendapat perhatian yang lebih besar untuk mengidentifikasi bagaimana pengalaman dan strategi bertahan hidup masyarakat perkotaan dipengaruhi oleh perbedaan peran serta relasi gender.

Reference

- Amaya, S. N., Mubarak, A., & Raharja, R. M. (2024). Dampak Urbanisasi Dalam Kehidupan Masyarakat Kota. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 116–126. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.132>
- Asyifani, K., Alauddin, M. A., Herlina, H., & Purnamasari, K. (2021). Solidaritas Sosial dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta). *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(1), 61–75. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052>
- Ayu, S. D., & Huda, L. (2025). *Jalan Pesanggrahan Pademangan Timur Langganan Banjir, Warga Ungkap Penyebabnya*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/12/13305171/jalan-pesanggrahan-pademangan-timur-langganan-banjir-warga-ungkap>
- BPS-Statistics Indonesia. (2025). *In September 2024, the Percentage of the Poor Population Decreased Into 8.57 Percent*. <https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/01/15/2401>
- Carias, M. S. E., Johnston, D. W., Knott, R., & Sweeney, R. (2022). Flood Disasters and Health Among the *Urban poor*. *Cornell University Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.05455>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE.
- Fadhil, D. N., Wihanesta, R., Aulifia, R., Surjadi, P., Hakim, S., Pribadi, Y. S., Silitonga, S. A., Nabila, G., Aryani, B., & Alwi, B. (2024). *Mengurai Kompleksitas Urbanisasi dan Pembangunan Kota Berkelanjutan, Mendorong Solusi untuk Kota-Kota Indonesia Inklusif dan Tangguh*. WRI Indonesia. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/mengurai-kompleksitas-urbanisasi-dan-pembangunan-kota-berkelanjutan-mendorong-solusi-untuk>
- Faturohim, A., Akbar, A., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2023). An Analysis of Urban Poverty and Unemployment. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 309–324. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.309-324>
- Fitri, W., Tan, W., & Delia, D. (2025). Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3390>
- Hadijah, Z., & Sadali, M. I. (2020). Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(3), 290–306. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306>
- Hasibuan, F. A., & Muary, R. (2026). STRATEGI BERTAHAN HIDUP KELUARGA MISKIN PERKOTAAN DI PERMUKIMAN KUMUH JALAN BADUR, KECAMATAN MEDAN MAIMUN. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(3), 815–822. <https://doi.org/10.31604/jips.v13i3.2026>
- He, R. (2025). *Warga RW 12 Pesanggrahan, Pademangan Timur, Gelar Aksi Damai Desak Terealisasi PIPANISASI PAM Jaya*. RasioNews. <https://dki.rasionews.com/warga-rw-12-pesanggrahan-pademangan-timur-gelar-aksi-damai-desak-terealisasi-pipanisasi-pam-jaya/>
- Lasaiba, M. A. (2022). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *GEOFORUM*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp63-72>
- Lestianpuri, A., & Arif, M. (2025). URBAN POVERTY (CASE STUDY OF EAST JAVA FROM 2018-2022). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 8(2), 2854–2867.
- Massauna, M. W., Hamra, S., Nuratika, & Panggoa, E. (2025). Kesenjangan Sosial Di Perkotaan : Kemiskinan Dan Ketimpangan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(5), 7869–7874. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.11181>
- Mpanje, D., Gibbons, P., McDermott, R., Omia, D. O., & Olungah, C. O. (2022). Social Capital Undergirds Coping Strategies: Evidence From Two Informal Settlements In Nairobi. *Journal of International Humanitarian Action*, 7(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s41018-022-00115-0>
- Nath, S. (2024). Mobilising Transformative Community-Based Climate Change Adaptation. *Urban Transformations*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s42854-023-00059-7>
- Nugroho, A. Y., & Murtasidin, B. (2023). Penghidupan Berkelanjutan dan Dinamika Batasan Penghidupan Masyarakat Miskin Perkotaan di Wilayah Kampung Tambora Jakarta. *Journal of Political Issues*, 4(2), 89–98. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.89>
- Putri, D., Kurniawan, R., Fajriani, S. W., & Putri, L. S. (2026). Kemiskinan Perkotaan sebagai Fenomena Multidimensional: Dinamika dan Strategi Bertahan Kelompok Rentan di Permukiman Sempadan Sungai Cibeureum, Kota Bandung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 4938–4947. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6120>
- Sahanaya, C., & Maswekan, M. (2024). Survival Strategy Masyarakat di Wilayah Kepulauan (Studi Kasus terhadap Adaptasi Masyarakat Miskin). *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 11023–11031. <https://doi.org/10.54371/jhip.v6i12.6031>
- Satrio, M. I., & Sukmawati, A. M. (2021). KEBERTAHANAN MASYARAKAT PADA PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN ASPEK SOSIAL EKONOMI DI KELURAHAN SALATIGA, KOTA SALATIGA. *Desa-Kota*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.43694.36-48>
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed., Vol. 5). ALFABETA. www.cvalfabeta.com
- Wacquant, L. J. D. (2008). *Urban Outcasts : a Oomparative Sociology of Advanced Marginality*. Polity.
- Wijangga, P., Tivantara, B. J., & Putri, A. B. R. (2025). Urbanisasi dan Disparitas Kesejahteraan di Perkotaan: Sebuah Tinjauan Sistematis tentang Dampak pada Kelompok Rentan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(2), 207–225. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i2.101191>